

ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Bayu Fajar Nugroho¹, Kushandajani²

Email: stefanusbayufn@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon: (024) Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola lingkungan daerah karena peningkatan timbulan sampah tidak selalu diikuti dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Kabupaten Klaten menghadapi permasalahan serupa, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon serta belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari sumber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten melalui perspektif Good Environmental Governance (GEG) berdasarkan tujuh prinsip yang dikemukakan oleh Belbase (2010), yaitu aturan hukum, partisipasi dan representasi masyarakat, akses informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi demokratis, kelembagaan dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam narasumber yang terdiri dari pemerintah daerah, pengelola TPA, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak, serta diperkuat melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengembangkan berbagai instrumen pengelolaan sampah berbasis hulu seperti TPST3R, bank sampah, dan program pengurangan sampah berbasis masyarakat. Namun, ketersediaan infrastruktur tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas implementasi. Pengelolaan sampah masih menunjukkan dominasi paradigma end-of-pipe yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap TPA Troketon. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan kapasitas TPA, degradasi kualitas lingkungan, serta munculnya dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan perspektif Good Environmental Governance, tantangan utama pengelolaan sampah Kabupaten Klaten tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi juga mencakup kapasitas kelembagaan, konsistensi implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan keadilan lingkungan bagi kelompok terdampak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan membutuhkan perubahan paradigma dari sistem yang berorientasi pada pembuangan menuju

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

tata kelola terpadu yang menekankan pengurangan sampah, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah; Good Environmental Governance; Kabupaten Klaten; TPA Troketon; Tata Kelola Lingkungan

ABSTRACT

Waste management has become one of the major challenges in regional environmental governance due to increasing waste generation that is not always followed by adequate management capacity. Klaten Regency faces similar challenges, particularly due to increasing pressure on the Troketon Final Processing Site (TPA) and the limited effectiveness of waste reduction efforts at the source level. This study aims to analyze waste management practices in Klaten Regency from the perspective of Good Environmental Governance (GEG) based on the seven principles proposed by Belbase (2010), namely rule of law, participation and representation, access to information, transparency and accountability, democratic decentralization, institutional capacity, and access to justice. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with six informants consisting of local government officials, TPA managers, village governments, and affected communities, supported by field observations and document analysis. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion verification. The results indicate that the Klaten Regency Government has developed various upstream waste management instruments, including TPST3R facilities, waste banks, and community-based waste reduction programs. However, the availability of these facilities has not been fully followed by effective implementation. Waste management practices remain dominated by an end-of-pipe approach, resulting in high dependency on the Troketon Final Processing Site. This condition has contributed to landfill capacity pressure, environmental degradation, and social impacts experienced by surrounding communities. From the perspective of Good Environmental Governance, the main challenges in waste management are not only related to regulatory availability but also involve institutional capacity, policy implementation consistency, public participation, and environmental justice for affected communities. This study highlights that sustainable waste management requires a paradigm shift from disposal-oriented management toward integrated governance that emphasizes waste reduction, institutional strengthening, and inclusive stakeholder participation.

Keywords: Waste Management; Good Environmental Governance; Klaten Regency; Troketon Landfill; Environmental Governance

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi sebuah persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Peningkatan jumlah

penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah volume timbunan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai regulator dan pemangku kebijakan dituntut untuk menghadirkan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak hanya

berorientasi pada penanganan di sektor akhir, tetapi juga mampu mengintegrasikan upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menjadi landasan konstitusional dalam pengelolaan sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, berdasarkan pada pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan sampah harus berdasarkan kepada prinsip berkelanjutan.

Namun implementasi pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menunjukkan paradigma *end of pipe*, yaitu pendekatan yang menempatkan sampah sebagai residu akhir yang diselesaikan melalui proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan (Ragossnig, 2025). Paradigma tersebut yang menyebabkan beban pengelolaan lebih banyak berada pada sektor hilir, sementara aspek pengurangan, pemilihan dan pemanfaatan kembali di tingkat hulu belum berjalan optimal.

Tabel 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Klaten

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Presentase Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Presentase Penanganan Sampah
2025	239,352.07	0,00	0,00	65,606.82	27.41%
2024	238,699.57	0,00	0,00	124,696.46	52.24%
2023	237,050.70	32,418.21	13.68	85,314.24	35.99%
2022	234,703.44	58,588.80	25.96	72,010.38	30.68%
2021	215,458.83	56,823.20	26.37	34,327.79	15.93%

Sumber: <https://sampahnasional.kemenvh.go.id/>

Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah yang menghadapi kompleksitas persoalan mengenai pengelolaan sampah. Menurut Data Sistem Informasi dan Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSSN) menunjukkan bahwa timbulan sampah di

Kabupaten Klaten meningkat dari 215.458,83 ton pada tahun 2021 menjadi 239.352,07 ton pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya tekanan yang semakin besar terhadap sistem pengelolaan sampah daerah.

Peningkatan volume timbulan sampah tersebut kemudian berdampak langsung terhadap sektor hilir, dalam hal ini adalah Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Troketon di Kabupaten Klaten. TPA yang menjadi pusat akhir dari pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten mengalami tekanan dan *over capacity*. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya volume sampah yang masuk dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten yang bermuara di TPA Troketon. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan kemampuan sistem pengelolaan yang tersedia. Lebih lanjut permasalahan ini kemudian akan berdampak kepada ancaman pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta persoalan sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan TPA.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang masif di sektor pengelolaan sampah seperti pembangunan fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST3R), pengelolaan sampah terpadu. Pembangunan tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, keberadaan regulasi dan program tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang terjadi di lapangan. Masih

terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dengan implementasi substantif, yang terlihat dari masih kuatnya ketergantungan terhadap pendekatan akhir, keterbatasan pengolahan di tingkat sumber, serta belum optimalnya keterlibatan berbagai aktor dalam sistem pengelolaan sampah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur, mengoordinasikan, dan membangun kolaborasi dengan berbagai aktor. Maka dari itu Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dengan melibatkan *political will* dan komitmen dari otoritas lokal (Dethier, 2017).

Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten tidak dapat hanya dilihat melalui perspektif teknis lingkungan, tetapi perlu dikaji sebagai persoalan tata kelola pemerintahan. Konsep Good Environmental Governance (GEG) menjadi relevan karena menekankan kepada pengelolaan pemerintah di bidang sumber daya beserta kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Nopyandri, 2011). Melalui konsep ini, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya dilihat dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari bagaimana prinsip-prinsip tata kelola seperti aturan hukum, partisipasi masyarakat, akses informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi demokratis, kelembagaan, serta akses terhadap keadilan dapat diterapkan.

Kajian mengenai pengelolaan sampah dalam perspektif Good Environmental Governance sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, evaluasi kebijakan, atau melihat pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan. Sementara itu, kajian yang melihat pengelolaan sampah sebagai proses tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat dan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh persoalan sampah, masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan melihat bagaimana prinsip Good Environmental Governance diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, analisis terhadap pengelolaan sampah Kabupaten Klaten dalam perspektif Good Environmental Governance diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan tata kelola persampahan daerah serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif Good Environmental Governance. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan

sampah di Kabupaten Klaten berdasarkan prinsip-prinsip Good Environmental Governance serta memahami dinamika hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aktor terkait dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini menggunakan konsep Good Environmental Governance (GEG) untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. GEG merupakan pengembangan dari konsep good governance yang secara lebih khusus membahas tata kelola lingkungan. Dalam konsep ini, persoalan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membuat aturan, menjalankan kebijakan, membangun kelembagaan, membuka informasi, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan (Purniawati et al., 2020).

Good Environmental Governance juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Belbase (2010) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan yang baik perlu mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Konsep ini relevan untuk digunakan dalam penelitian pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlah timbulan atau kapasitas TPA, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kebijakan, hubungan antaraktor, keterbukaan pemerintah, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Prinsip Good Environmental Governance

Penelitian ini menggunakan tujuh prinsip Good Environmental Governance yang dikemukakan oleh Belbase (2010). Ketujuh prinsip tersebut digunakan sebagai dasar untuk membaca kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, baik dari sisi kebijakan formal maupun pelaksanaannya di lapangan.

1. Aturan Hukum (Rule of Law)

Prinsip aturan hukum digunakan untuk melihat apakah pengelolaan sampah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan apakah aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Dalam penelitian ini, analisis tidak berhenti pada keberadaan peraturan daerah atau aturan teknis, tetapi juga melihat pelaksanaan, sosialisasi, pengawasan, serta kepatuhan para pihak terhadap aturan pengelolaan sampah. Prinsip ini penting karena keberadaan regulasi belum tentu menghasilkan pengelolaan lingkungan yang baik apabila tidak diikuti kemampuan pemerintah untuk memastikan aturan tersebut berjalan dalam praktik.

2. Partisipasi dan Representasi Masyarakat

Prinsip partisipasi dan representasi masyarakat digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang telah ditentukan pemerintah, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, perhatian juga diberikan

kepada masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Troketon dan kelompok informal seperti pemulung karena kelompok tersebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pengelolaan sampah.

3. Akses terhadap Informasi

Prinsip akses terhadap informasi digunakan untuk menilai apakah informasi mengenai pengelolaan sampah tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang dimaksud mencakup data persampahan, program pemerintah, kondisi fasilitas pengelolaan, serta informasi mengenai dampak lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, akses informasi juga dilihat dari sejauh mana masyarakat yang berada di sekitar TPA Troketon memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan kebijakan pemerintah.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas digunakan untuk melihat keterbukaan pemerintah dalam menjalankan program pengelolaan sampah serta bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dilaksanakan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai program, anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan keputusan pemerintah. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan hasil program serta menangani dampak yang muncul dari pengelolaan sampah. Dengan prinsip ini, penelitian melihat apakah keterbukaan yang tersedia hanya bersifat administratif atau juga dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

5. Desentralisasi yang Demokratis

Prinsip desentralisasi yang demokratis digunakan untuk melihat bagaimana kewenangan pengelolaan sampah dibagi sampai ke tingkat lokal, terutama pemerintah desa. Dalam pengelolaan sampah, desa memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan sumber timbulan sampah dan masyarakat. Penelitian ini melihat apakah pelimpahan kewenangan kepada desa juga disertai dengan dukungan sumber daya manusia, fasilitas, pembiayaan, dan pendampingan. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya dinilai dari pembagian tugas, tetapi juga dari kemampuan aktor lokal untuk menjalankan kewenangan tersebut secara efektif.

6. Kelembagaan dan Institusi

Prinsip kelembagaan dan institusi digunakan untuk melihat kapasitas organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Analisis mencakup kejelasan tugas dan fungsi, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPA, pemerintah desa, TPS3R, bank sampah, dan kelompok masyarakat. Keberadaan banyak lembaga tidak secara otomatis menunjukkan tata kelola yang baik apabila koordinasi dan kapasitas operasionalnya masih terbatas.

7. Akses untuk Memperoleh Keadilan

Prinsip akses untuk memperoleh keadilan digunakan untuk melihat apakah masyarakat memiliki mekanisme yang jelas untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh penyelesaian ketika mengalami dampak lingkungan. Prinsip ini juga berkaitan dengan pemerataan beban lingkungan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam penelitian ini,

perhatian diberikan kepada masyarakat desa penyangga TPA Troketon dan pemulung untuk melihat apakah kelompok yang menerima dampak langsung telah memperoleh perlindungan, ruang pengaduan, dan perlakuan yang adil dalam tata kelola pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif *Good Environmental Governance* (GEG). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses tata kelola persampahan, relasi antaraktor, serta kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik pengelolaan sampah di lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan tujuh prinsip *Good Environmental Governance* dari Belbase (2010), yaitu *rule of law*, partisipasi dan representasi masyarakat, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi yang demokratis, kelembagaan dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten dengan mengambil beberapa lokasi yang berkaitan langsung dengan tata kelola persampahan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon, serta tiga desa penyangga TPA Troketon, yakni Desa Troketon, Desa Kaligawe, dan Desa Kalangan, Kecamatan Pedan. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pengelolaan sampah secara lebih utuh, mulai dari perspektif pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan hingga

kondisi empiris pada wilayah yang menerima dampak langsung dari aktivitas TPA Troketon.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam informan yang memiliki keterlibatan atau pengalaman langsung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Informan tersebut meliputi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, pihak UPTD TPA Troketon, Pemerintah Desa Troketon, Pemerintah Desa Kaligawe, Pemerintah Desa Kalangan, serta pemulung yang beraktivitas di TPA Troketon. Kehadiran informan dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola TPA, dan kelompok informal digunakan untuk memperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai implementasi tata kelola persampahan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintahan, data pengelolaan persampahan, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan sampah dan *Good Environmental Governance*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan studi dokumentasi/pustaka. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan program, hubungan antarpemangku kepentingan, permasalahan pengelolaan sampah, serta pengalaman kelompok yang terdampak. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pengelolaan sampah, khususnya pada TPA Troketon dan wilayah penyangganya, sehingga

informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat dibandingkan dengan kondisi faktual di lapangan. Studi dokumentasi dan pustaka digunakan untuk menelaah kebijakan, data persampahan, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian disajikan secara naratif dan tematik berdasarkan tujuh prinsip *Good Environmental Governance*. Proses ini memungkinkan temuan empiris dari masing-masing aktor dibandingkan dengan kerangka konseptual yang digunakan sehingga dapat diidentifikasi pola tata kelola, kesenjangan implementasi, dan hambatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan serta dokumen dan sumber tertulis yang relevan. Temuan yang telah diverifikasi selanjutnya diinterpretasikan dengan tujuh prinsip *Good Environmental Governance* untuk menilai praktik tata kelola persampahan secara substantif, termasuk hubungan antara regulasi dan implementasi, pola partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, transparansi, serta

perlindungan terhadap masyarakat dan kelompok rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten masih menghadapi berbagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lingkungan. Permasalahan sampah di Kabupaten Klaten muncul seiring dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah yang belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 215.458,83 ton dan meningkat menjadi 239.352,07 ton pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah terus mengalami perkembangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah masih banyak bertumpu pada pendekatan end-of-pipe. Sampah yang telah dihasilkan masyarakat sebagian besar masih diarahkan menuju proses pengangkutan dan pemrosesan akhir, sementara pengurangan sampah melalui pemilahan, penggunaan kembali, dan pengolahan sejak tingkat sumber belum berjalan secara maksimal.

Fenomena tersebut berdampak langsung pada sektor hilir. TPA Troketon menerima tekanan akibat besarnya volume

sampah yang masuk, sementara kemampuan pengolahan belum sepenuhnya mampu mengimbangi beban tersebut. Penelitian menemukan adanya penumpukan sampah serta persoalan lingkungan berupa bau, peningkatan populasi lalat, dan persoalan air lindi yang dirasakan masyarakat di desa sekitar TPA. Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendekatan end-of-pipe masih kuat karena pengurangan sampah di sumber belum berjalan secara efektif. Dengan demikian, persoalan TPA tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan efektivitas tata kelola sampah di sektor hulu.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan publik, dan koordinasi antaraktor. Persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyediaan fasilitas akhir, tetapi membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu menghubungkan kebijakan pemerintah dengan keterlibatan masyarakat.

Permasalahan TPA Troketon Sebagai Gambaran Tata Kelola Pemerintahan

TPA Troketon menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana sistem pengelolaan sampah Kabupaten Klaten berjalan. Sebagai tempat pemrosesan akhir, TPA Troketon menerima sampah dari berbagai wilayah Kabupaten Klaten. Tingginya jumlah sampah yang masuk menyebabkan peningkatan beban pengelolaan dan memberikan tekanan terhadap kapasitas fasilitas tersebut.

Permasalahan yang terjadi di TPA Troketon menunjukkan bahwa

penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hilir. Ketika jumlah sampah dari masyarakat terus meningkat sementara upaya pengurangan di tingkat sumber belum optimal, maka TPA akan menjadi titik penumpukan utama dari seluruh persoalan persampahan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memiliki hubungan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyediakan pelayanan pengangkutan sampah, tetapi juga membangun mekanisme pengurangan sampah, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan.

Rule Of Law: Regulasi Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah

Dalam prinsip Good Environmental Governance, aturan hukum menjadi dasar penting dalam memastikan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki komitmen formal dalam mengatur persoalan persampahan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan di lapangan. Tantangan utama berada pada tahap implementasi, khususnya dalam memastikan pengurangan sampah dari sumber dan perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, prinsip rule of law dalam pengelolaan sampah Kabupaten Klaten telah terpenuhi dari sisi keberadaan regulasi, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan konsistensi penerapan kebijakan.

Partisipasi dan Representasi Masyarakat

Pengelolaan sampah merupakan bidang pelayanan publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menghasilkan sampah, tetapi juga memiliki peran dalam mengurangi dan mengelola sampah tersebut

Pada aspek partisipasi dan representasi, pemerintah telah menyediakan berbagai ruang keterlibatan melalui Musrenbang, bank sampah, TPS3R, serta kelompok lingkungan. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat masih lebih kuat pada aspek pelaksanaan daripada proses pengambilan keputusan. Masyarakat di sekitar TPA Troketon yang menerima dampak langsung belum sepenuhnya memiliki pengaruh terhadap keputusan strategis.

Kondisi serupa ditemukan pada kelompok pemulung. Mereka terlibat secara langsung dalam aktivitas pemilahan sampah, tetapi penelitian belum menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi telah tersedia secara kelembagaan, tetapi kualitas partisipasi substantif dan representasi kelompok rentan masih perlu diperkuat.

Akses Terhadap Informasi

Keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola lingkungan karena masyarakat membutuhkan informasi untuk memahami kondisi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam pengelolaan sampah Kabupaten Klaten, informasi mengenai program persampahan telah tersedia, tetapi masih diperlukan peningkatan dalam hal kemudahan akses dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat. Transparansi bukan hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat mendorong partisipasi publik.

Namun, masyarakat di sekitar TPA menyampaikan bahwa informasi mengenai kondisi TPA, rencana pengelolaan, jadwal kegiatan, maupun kebijakan yang berdampak langsung terhadap desa belum selalu diterima secara terbuka dan rutin. Masyarakat justru lebih banyak mengetahui kondisi lingkungan melalui pengalaman langsung, seperti bau, peningkatan populasi lalat, dan perubahan kondisi saluran air. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada distribusi dan keterjangkauannya bagi masyarakat yang terdampak langsung.

Kelembagaan dan Desentralisasi Demokratis

Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan sampah sebagai konsekuensi dari desentralisasi pemerintahan. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kabupaten Klaten menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan

sampah. Namun, kompleksitas permasalahan sampah menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Pengelolaan sampah membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok informal.

Pada prinsip desentralisasi demokratis, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mendorong desa untuk berperan dalam pengelolaan sampah melalui TPS3R, bank sampah, pemanfaatan sumber daya lokal, serta penyusunan kebijakan di tingkat desa. Namun, pelimpahan tanggung jawab belum selalu disertai dukungan sumber daya manusia, fasilitas, pembiayaan, dan pendampingan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yang diberikan dengan kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakannya. Desentralisasi pengelolaan sampah karena itu belum cukup hanya berupa pembagian tugas, tetapi perlu disertai penguatan kapasitas kelembagaan pada tingkat lokal.

Pada aspek kelembagaan, struktur pengelolaan sampah telah terbentuk melalui Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPA, pemerintah desa, TPS3R, bank sampah, dan kelompok masyarakat. Kendati demikian, keterbatasan sumber daya manusia serta koordinasi antaraktor masih menjadi hambatan. Dokumen kelembagaan yang dianalisis dalam penelitian menunjukkan kekurangan personel pada sejumlah posisi operasional seperti pengemudi, operator alat berat, dan teknisi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan institusi dalam memberikan pelayanan persampahan secara optimal. Dengan demikian, tantangan kelembagaan tidak hanya

berkaitan dengan keberadaan organisasi, tetapi juga kemampuan organisasi menjalankan mandat, membangun koordinasi, dan menyediakan kapasitas operasional yang memadai.

Akses Untuk Memperoleh Keadilan

Prinsip akses terhadap keadilan menekankan bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Dalam konteks Kabupaten Klaten, masyarakat sekitar TPA Troketon menjadi kelompok yang mengalami dampak langsung dari aktivitas pengelolaan sampah.

Prinsip akses memperoleh keadilan menjadi salah satu dimensi yang masih memerlukan penguatan. Mekanisme pengaduan telah tersedia, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan cenderung berkembang setelah muncul keluhan atau tekanan masyarakat. Beban ekologis akibat keberadaan TPA juga lebih banyak dirasakan oleh desa-desa di sekitar fasilitas tersebut.

Kelompok pemulung sebagai pekerja informal turut menghadapi risiko lingkungan, tetapi perlindungan sosial dan representasi mereka masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kanal pengaduan, tetapi juga menyangkut distribusi dampak, perlindungan kelompok rentan, mekanisme kompensasi, dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Sintesis Hasil Penelitian

Secara keseluruhan, penerapan Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah Kabupaten Klaten telah memiliki fondasi kelembagaan dan

regulasi, tetapi masih menghadapi kesenjangan antara aspek formal dan substantif. Regulasi, forum partisipasi, kanal informasi, mekanisme akuntabilitas, desentralisasi, serta kelembagaan telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi menjadi sistem pengelolaan sampah yang preventif, partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masalah persampahan di Kabupaten Klaten bukan hanya persoalan keterbatasan fasilitas pengolahan, tetapi juga persoalan kualitas implementasi tata kelola. Lemahnya pengurangan sampah dari sumber meningkatkan tekanan terhadap TPA Troketon; keterbatasan partisipasi dan akses informasi mengurangi kemampuan masyarakat melakukan pengawasan; sedangkan desentralisasi tanpa dukungan kapasitas membatasi efektivitas pengelolaan pada tingkat desa. Oleh karena itu, pergeseran dari paradigma end-of-pipe menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan membutuhkan penguatan implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, partisipasi substantif, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan kelompok rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dalam perspektif Good Environmental Governance, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten telah memiliki dasar kebijakan dan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan yang

menyebabkan sistem pengelolaan belum berjalan secara optimal.

Permasalahan utama pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten terletak pada masih dominannya pendekatan end-of-pipe yang menempatkan proses pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sebagai fokus utama pengelolaan. Kondisi tersebut menyebabkan beban pengelolaan semakin besar pada TPA Troketon akibat peningkatan jumlah timbulan sampah yang belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pengurangan dan pengolahan sampah sejak tingkat sumber.

Dalam perspektif Good Environmental Governance, pengelolaan sampah Kabupaten Klaten telah menunjukkan beberapa aspek yang mendukung tata kelola lingkungan, terutama melalui keberadaan regulasi daerah dan peran kelembagaan pemerintah. Namun, implementasi prinsip-prinsip GEG masih menghadapi beberapa keterbatasan. Pada aspek rule of law, pemerintah daerah telah memiliki regulasi sebagai dasar pengelolaan sampah, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan implementasi dan pengawasan di lapangan.

Pada aspek partisipasi dan representasi masyarakat, keterlibatan masyarakat telah dilakukan melalui berbagai program pengelolaan sampah, tetapi partisipasi tersebut masih cenderung bersifat pelaksanaan program dan belum sepenuhnya berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan. Kelompok informal seperti pemulung juga masih membutuhkan ruang representasi yang lebih kuat dalam tata kelola pengelolaan sampah.

Prinsip akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan informasi dan menjalankan program pengelolaan sampah, tetapi masih diperlukan penguatan keterbukaan informasi publik serta mekanisme pengawasan agar masyarakat dapat berperan lebih aktif. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perlu didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antaraktor.

Pada aspek akses terhadap keadilan lingkungan, keberadaan TPA Troketon menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memiliki dampak sosial terhadap masyarakat sekitar kawasan penyangga. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu memperhatikan perlindungan masyarakat terdampak serta menyediakan ruang penyampaian aspirasi dan penyelesaian masalah lingkungan.

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah Kabupaten Klaten masih membutuhkan penguatan tata kelola yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Perubahan paradigma dari sistem yang berorientasi pada pembuangan akhir menuju sistem yang menekankan pengurangan sampah sejak sumber, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan prinsip Good Environmental Governance.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memperkuat pengelolaan

sampah dari tingkat sumber melalui peningkatan program pemilahan, pengurangan sampah, dan pengolahan berbasis masyarakat untuk mengurangi beban TPA Troketon.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih substantif dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan persampahan. Selain itu, kelompok informal seperti pemulung perlu diberikan ruang representasi dalam sistem pengelolaan sampah.

Ketiga, diperlukan penguatan transparansi informasi dan koordinasi antaraktor agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih akuntabel dan responsif terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106-118.
- APLAS. (2002). *Landfills as Mainstay for Solid Waste Management in Indonesia*. KISS (Korea).
- Arinda, E., Sitogasa, P. S. A., Fadilah, K., & Lukita, C. W. (2023). Perencanaan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Juata Kerikil dengan Sistem Sanitary Landfill di Kota Tarakan Kalimantan Utara. *Jurnal EnviTATS, ITATS*.
- Asiyah, N. (2019). Kebijakan pemerintah kota langsa terhadap pengelolaan

- sampah dalam memenuhi prinsip good environmental governance. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316-327. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1920>
- Belbase, N. (2010). *Good environmental governance in the future constitution*. Nepal: IUCN.
- du Plessis, A. (2008). Public participation, good environmental governance and fulfilment of environmental rights. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 11(2), 1-34.
- Fujianti, L, dkk. (2024). Good Corporate Governance Dan Environmentalal, Social, Governance Disclosures Di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.28986>
- Karabulut, B. Y., Derin, P., Yeşilnacar, M. İ., & Çullu, M. A. (2021). A study on evaluation of site selection in sanitary landfill with regard to urban growth. *Environmental Research and Technology*, 4(2), 117-125.
- Klaten (2018, April 12). *Peraturan daerah (perda) kabupaten klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah*.
- Mahyudin, R. (2017). Study od Waste Problems and Landfill Enviromental Impact. *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
- Niyah, N. V. A. (2017). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(2).
- Nopyandri, N. (2011). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43256.
- Nugroho, G. P., Sulistiowati, dkk.(2023). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 5(2), 155-162. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v5i2.185>
- Nur, M. S., & Husen, A. (2022). Studi Literatur: Penerapan Good Environmental Governance dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35-49.
- Oliet, M., Negro, C., Blanco, M.A., & Mirada, F.J. (1993). Site best suitable for the disposal of urban solid waste. *Journal of Environmental Science and Health. Part A*, 28(5), 1037-1054. doi:10.1080/10934529309375928
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good environmental governance in indonesia (perspective of environmental protection and management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43-56.
- Putra, Audi, and Dedon Dianta. “Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Implementasi Prinsip Good Environmental Governance .” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, vol. 4, no. 1, 1 Apr. 2024, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.13>. Accessed 3 Dec. 2025.